

Desentralisasi, Diversitas, dan Dinamika Kependudukan

Agus Dwiyanto

UGM

Dinamika pelayanan kependudukan

- Ada beberapa perspektif untuk memahami dinamika kependudukan:
- *Transisi demografi*
- Beberapa daerah telah mengalami transisi demografi, sementara daerah lain masih mengalami pertumbuhan penduduk yang tinggi. Profil penduduk berbeda antar daerah dan menuntut pelayanan yang berbeda
 - Daerah dengan angka pertumbuhan penduduk yang rendah, pelayanan untuk penduduk lansia; Daerah dengan pertumbuhan penduduk tinggi membutuhkan pelayanan KB dan reproduksi.
 - Profil penduduk juga berpengaruh terhadap pelayanan ketenagakerjaan, pelayanan kesehatan, dsb

Dinamika pelayanan.... (2)

- *Transformasi politik dan ekonomi*
- Demokratisasi- pengakuan terhadap hak-hak politik warga, yang tidak diikuti dengan perbaikan registrasi penduduk, menimbulkan permasalahan DPT, hak-hak perdata terkait dan hak ekonomi dengan status sebagai penduduk dan pemukim (penduduk Bogor tetapi bermukim di Jakarta, dsb)
- Globalisasi- mobilitas penduduk dan virus antar negara yang belum banyak direspon oleh negara. Human trafficking (perdagangan perempuan dan anak), viruses mobility antar negara dan antar daerah, mobilitas tenaga kerja, dsb. Daerah pengirim dan penerima migrasi penduduk memerlukan pelayanan yang berbeda

Dinamika pelayanan... (3)

- Transisi menuju NKRI yang desentralistis. Desentralisasi mengalihkan sebagian besar urusan pemerintahan kepada daerah dengan kriteria yang kurang jelas dan konsisten, seperti efisiensi, akuntabilitas, dan eksternalitas; skala provinsi vs skala kabupaten. Menimbulkan kesulitan daerah mengembangkan pelayanan kependudukan.
- Desentralisasi urusan yang seragam dan desentralisasi fiskal yang tidak berbasis pada urusan mendorong munculnya *moral hazards* dalam penyelenggaraan pelayanan. Pelayanan yang cost-center cenderung dihindari. Misal, KB

Tantangan baru?

- Muncul jenis kebutuhan pelayanan baru yang mungkin belum diatur dalam peraturan perundangan yang ada atau belum diurus oleh pemerintah?
- Bagaimana pemerintah merespon dinamika pelayanan kependudukan? Division of labor? Siapa bertanggungjawab tentang apa?
- Fleksibilitas kepada daerah untuk mengembangkan pelayanan berbasis pada diversitas kebutuhan

Perspektif Kewilayahan

- Kriteria Efisiensi, Eksternalitas, dan akuntabilitas? Susunan dan tingkat pemerintahan yang mana untuk pelayanan yang mana?
- Kesulitan muncul karena kriteria pembagian urusan tidak jelas orientasinya? Efisiensi selalu cenderung mengarah pada skala, semakin besar skalanya semakin efisien karena itu semakin tinggi susunannya semakin efisien (sentralistis), Akuntabilitas cenderung mengarah pada desentralistis, semakin rendah susunan pemerintahan, semakin dekat dengan warga semakin mudah mengecek akuntabilitasnya. Efisiensi vs akuntabilitas? Kalau terjadi perbedaan antara efisiensi/ akuntabilitas dengan eksternalitas? Mana yang harus diambil?
- Harus jelas kriteria yang digunakan!, Revisi PP 38/2007

Perspektif sektoral?

- Masalah kependudukan cenderung terfragmentasi kedalam banyak sektor? Departementalisasi atau ketidakmampuan kita memahami substansi?
- Reintegrasi berbasis diversitas (revisi PP 41/2007). Beri kewenangan kepada daerah untuk merespon dinamika kependudukan yang terjadi sesuai dengan ciri-ciri daerah dan profil penduduknya. DIY pelayanan lansia sangat penting, NTB pelayanan reproduksi sangat penting, daerah penyuplai TKI Tulung Agung, Bawean pelayanan ketenagakerjaan, beberapa daerah di NTT
- Desentralisasi asimetris, agar daerah dapat mengembangkan pelayanan kependudukan sesuai dengan profil penduduknya

Apa pembelajaran yang dapat dipetik?

- Ciri-ciri demografis dan diversitas kependudukan antar daerah menuntut adanya pelayanan pendidikan yang berbeda antar daerah. Fungsi, struktur kelembagaan, dan program pelayanan dalam bidang kependudukan berbeda antar daerah
- Reformasi dalam desentralisasi fiskal diperlukan untuk mendorong daerah mengembangkan daerah pelayanan kependudukan sesuai dengan kebutuhan daerah. DAU perlu didorong untuk berbasis pada urusan, bukan atas dasar jumlah penduduk, pegawai, atau luas wilayah.
- DAK dapat dijadikan instrumen untuk mendorong daerah menjadi lebih responsif terhadap masalah kependudukannya.

Apa pembelajaran yang dapat dipetik?

- New areas of research? Ada banyak peluang riset yang mungkin belum banyak dilirik orang?
- Pembagian urusan dalam pelayanan bidang kependudukan perlu dikaji ulang, baik dari perspektif pembagian antar susunan pemerintahan ataupun antar sektor?
- Mekanisme hubungan antara pusat dan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan kependudukan (MDGs) perlu dikaji ulang? Pengendalian jumlah penduduk, angka kematian bayi, angka kematian maternal? Penyeragaman struktur birokrasi kependudukan perlu dihindari? Perlu ada upaya mendorong aliansi tujuan, kolaborasi pusat dan daerah dalam pengelolaan masalah kependudukan.

Implikasi kebijakan

- Revisi PP 38/2007 dan PP 41/2007. PP yang baru harus dibuat dengan menempatkan pengakuan terhadap diversitas daerah sebagai semangat dan inspirasi. Desentralisasi dipilih karena Indonesia kaya akan diversitas
- Pengembangan program, struktur kelembagaan, dan kapasitas aparatur harus berdasarkan ciri-ciri daerah dan problema kependudukan yang dihadapi oleh daerah, yang cenderung berbeda antar ruang dan waktu.